

## ABSTRAKSI

Pada revolusi 1952, Nasser bersama Ikhwanul Muslimin bekerjasama dalam penumbangan Raja Farouk. Hubungan keduanya retak setelah terjadi perbedaan pandangan antara Nasser dan Ikhwanul Muslimin mengenai hukum syari'at Islam. Keduanya berseteru, antara pro dan kontra. Nasser yang mengetahui kekuatan besar Ikhwanul Muslimin, menganggap Ikhwanul Muslimin adalah ancaman serius karena dapat mengganggu eksistensinya. Sehingga, kebijakan yang diberlakukan Nasser terhadap Ikhwanul Muslimin adalah kebijakan yang bersifat represif. Pada kepemimpinan Husni Mubarak, Ikhwanul Muslimin juga mendapatkan tekanan karena ketidakmauan Ikhwan (anggota Ikhwanul Muslimin) untuk bekerjasama mendukung pemerintahan. Namun, Mubarak lebih akomodatif terhadap para oposannya.

Penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui bagaimana respon (strategi politik) Ikhwanul Muslimin dalam menghadapi dua rezim tersebut. Secara deskriptif akan digambarkan bentuk pertahanan dan perjuangan Ikhwan dalam mempertahankan ideologinya. Penelitian ini menggunakan literatur berupa data-data yang diperoleh dari buku, majalah, wawancara, dan sebagai pendukung data-data dari internet.

Dari hasil penelitian didapat perbedaan strategi politik Ikhwanul Muslimin dalam menghadapi rezim otoritarianisme tersebut. Pertama, pada kebijakan yang sangat represif oleh Nasser, Ikhwanul Muslimin menggunakan *low profile* strategi untuk mempertahankan kader-kadernya dan melakukan partisipasi politik negatif berupa demonstrasi. Sedangkan, pada kepemimpinan Mubarak yang akomodatif, Ikhwanul Muslimin menggunakan strategi *layering* dan Advokasi dalam menghadapi pemerintahan tersebut dan melakukan partisipasi politik positif dengan ikut andil dalam pemilu Majelis Rendah.

Sehingga didapat bahwa Ikhwanul Muslimin memiliki strategi berbeda dalam menghadapi dua rezim yang keduanya memiliki sifat sama yakni otoriter.